

KEYNOTE SPEECH
PADA
FORUM DISKUSI EVALUASI PILKADA SERENTAK
2015
Jakarta , 4 Mei 2016

- Yang kami hormati Ibu Linda Amaliasari Gumelar,
Ketua Umum Yayasan Gerakan Suara Perempuan
Indonesia.

- Para Pejabat Eselon I dan II Kementerian PP-PA,
undangan dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Shaloom dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada Seminar Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, memberkati dan melindungi kita semua.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada Ketua Umum Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hal penting terkait dengan “Forum Diskusi Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2015”. Forum Diskusi seperti ini sangat penting untuk membahas berbagai hal yang terkait dengan potensi dan kekuatan perempuan dalam pencalonan Pilkada Serentak tahun 2015. Kementerian PP-PA mengapresiasi atas penyelenggaraan ini, semoga diskusi ini dapat memperoleh masukan yang strategi dari para narasumber dan peserta yang dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak berkepentingan dalam rangka persiapan Pilkada serentak tahun 2017.

Para hadirin yang berbahagia.

Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015 memberikan arti penting bagi perempuan karena dari 528 calon kepala daerah/wakil kepala daerah di dalamnya terdapat 124 perempuan (23,5%) calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Sebanyak perempuan Cakada tersebut telah terpilih sebanyak 46 orang (37,1%) yang terdiri dari: 24 perempuan untuk kepala daerah dan 22 perempuan wakil kepala daerah. Hasil Pilkada tersebut menggambarkan bahwa

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, hal ini bisa dibuktikan pada terpilihnya Ibu Sri Hartini menjadi Bupati dan Ibu Sri Mulyani menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Klaten. Ini pertama kali dalam sejarah demokrasi di RI tercinta, yang mana satu paket calon sesama perempuan terpilih dan mampu menyingkirkan pesaingnya. Pada kesempatan ini, saya atas nama Kementerian PP-PA mengucapkan kepada mereka yang terpilih, semoga dalam mengemban tugasnya senantiasa sukses guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan semakin banyaknya jumlah perempuan menjadi kepala daerah akan sangat positif guna mempercepat kemajuan bangsa. Ini menunjukkan indikasi bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender telah banyak meraih kemajuan, bukan saja secara fisik melainkan juga non-fisik yang ditandai oleh semakin terbukanya paradigma kesetaraan gender bagi para penentu kebijakan di pusat dan di daerah; dan semakin luasnya partisipasi laki-laki dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Hal ini berarti pelaksanaan pengarusutamaan gender memberikan nilai tambah dalam memberikan nilai-nilai yang lebih terbuka (permisif) terhadap kemajuan perempuan, sehingga membuka ruang optimisme dalam mewujudkan gender equality : 50:50 pada tahun 2030. Untuk mencapai hal tersebut menuntut kerjasama sinergi semua kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan baik

yang ada di ranah pemerintahan maupun ranah kemasyarakatan serta ranah bisnis. Ketiga entitas besar tersebut menjadi satu kesatuan yang saling mempengaruhi terhadap maju dan mundurnya sebuah bangsa.

Peran perempuan sangat strategis dalam upaya mewujudkan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan, sementara posisi perempuan dalam pengambilan keputusan sangat rendah. Hal ini terlihat secara nasional bahwa: Perempuan di legislatif: DPR: 17,32%, DPD: 25,76%; DPRD Provinsi : 16.15% dan DPRD Kabupaten/Kota: 14%. Perempuan di *Eksekutif*: 23.5% Menteri, Gubernur/Kepala Daerah: 0%. Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah: 3%, Bupati/Wakil Bupati sekitar 10% dari 514 Kabupaten/Kota. Perempuan di Birokrasi Pemerintah: Eselon I: 21%, eselon II: 16%, eselon III: 21% dan eselon IV: 30%, jumlah total PNS/ASN: 49% perempuan dan 51% laki-laki, jumlah total ASN: 4,453.303 orang. Dengan jumlah dan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan tersebut, belum sepenuhnya mendukung untuk mengawal dan mewujudkan kebijakan pembangunan yang responsif gender.

Hadirin yang berbahagia.

Kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh perempuan sebagai agen perubahan sosial (*Agence of social changes*) akan berpengaruh positif terhadap citra diri perempuan dan opini publik, yang mendukung terhadap munculnya kepemimpinan perempuan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Faktanya, dari waktu ke waktu terjadi perkembangan positif seiring dengan meningkatnya jumlah posisi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Untuk itu diperlukan kebijakan yang mendukung penguatan posisi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam politik dan pemerintahan. Saya selaku Menteri PP-PA telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019. Grand Design tersebut, telah disosialisasikan di pusat dan daerah, dan kami juga telah mengirim surat resmi kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia untuk melaksanakan guna meningkatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di legislatif pada Pemilu 2019.

Kementerian PP-PA bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (LKPPM) telah menyusun modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Calon Kepala Daerah. Pelatihannya akan dimulai bulan

Mei – September 2016. Pelatihan Kepemimpinan Perempuan CAKADA ini sangat penting untuk mempersiapkan pemimpin perempuan yang siap maju dan bersaing guna meraih kemenangan pada Pilkada serentak 2017 dan 2018. Selanjutnya tahun ini, Kementerian PP-PA bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Puskapol Universitas Indonesia akan melaksanakan pendidikan politik kebangsaan perspektif gender guna menyiapkan kader-kader perempuan yang siap mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif pusat dan daerah pada Pemilu Legislatif 2019. Disamping itu, kami juga kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk meningkatkan kualitas SDM Perempuan sebagai aparatur sipil negara di birokrasi pemerintahan agar memiliki daya kompetitif seperti yang dituntut oleh UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Segenap komponen pengambilan keputusan pusat dan daerah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan jumlah perempuan berkualitas yang mengisi jabatan publik guna mengawal kebijakan pembangunan yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas *Three end and Plus Politik* yakni menghapus kekerasan, menghapus perdagangan manusia, dan mengatasi kemiskinan serta meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.

Ibu Linda Amaliasari Gumelar dan segenap jajaran GPSP yang kami hormati.

Dibalik kemajuan yang dicapai tersebut, secara bersamaan membawa tantangan baru seiring dengan perkembangan lingkungan strategis baik pada lingkup nasional maupun lingkup internasional. Perkembangan lingkungan strategis pada lingkup nasional terjadi dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan lebih tinggi dibarengi dengan tingginya aspirasi dan tuntutan baru guna meningkatkan tata kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, saya minta kepada Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan (GPSP) untuk terus menyuarakan aspirasi perempuan, bukan hanya memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang termarginalkan, melainkan menyuarakan kepentingan bangsa dan negara untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.

Perkembangan lingkungan strategis pada lingkup internasional, yaitu akan memasuki era pasar bebas ASEAN akhir tahun 2015 yang diwarnai derasnya arus barang dan jasa antar satu negara dengan negara lainnya. Situasi ini menuntut kesiapan dan kesediaan kualitas sumberdaya manusia laki-laki dan perempuan menjadi keniscayaan supaya mampu bersaing di era pasar bebas tersebut. Untuk itu, saya selaku Menteri PP-PA menghimbau kepada seluruh komponen bangsa tanpa

kecuali para tokoh perempuan di pusat dan daerah harus bekerjasama sinergi dan bekerja cerdas dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan selamat bagi para peserta, semoga selalu sukses dan mendapat bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Terimakasih.

Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yohana Susana Yembise